



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

NOMOR : 1 /DPRP/2023

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Kepala Daerah Provinsi Papua dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua telah mengusulkan Pembentukan Rancangan Perdasi dan Perdasus Tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pengusulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Pembentukan Peraturan Daerah bersama dengan Kepala Daerah telah menentukan skala prioritas Pembentukan Rancangan Perdasi dan Perdasus Tahun 2023;
 - c. bahwa skala prioritas Pembentukan Rancangan Perdasi dan Perdasus Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah disetujui oleh Fraksi dan Kelompok Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Papua untuk ditetapkan menjadi Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023;
 - d. bahwa untuk memenuhi huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan DPR Papua.
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat Jo. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1973 tentang Perubahan Nama Propinsi Irian Barat menjadi Irian Jaya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6801, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan DPR Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 Nomor 1).

Memperhatikan : 1. Pengusulan Kepala Daerah dan badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua tentang pembentukan rancangan Perdasi dan Perdasus Tahun 2023 yang disampaikan pada Rapat Paripurna ke-1 DPR Papua tanggal 6 Maret 2023;

2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPR Papua tentang skala prioritas pembentukan rancangan Perdasi dan Perdasus Tahun 2023 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-2 DPR Papua tanggal, 7 Maret 2023;

3. Pendapat Akhir Fraksi dan Kelompok Khusus DPR Papua terhadap skala prioritas pembentukan rancangan Perdasi dan Perdasus Tahun 2023 yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-3 DPR Papua tanggal, 8 Maret 2023;

Memperhatikan pula : Permusyawaratan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua pada Rapat Paripurna ke-3 DPR Papua tanggal 8 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2023;

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berjumlah 19 (sembilan belas) Rancangan Peraturan Daerah yang terdiri dari 16 (enam belas) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua dan 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua sebagaimana daftar terlampir;
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA selanjutnya sebagai dasar dalam pembahasan dan penetapan Raperdasi dan Raperdasus pada Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura;
Pada tanggal : 8 Maret 2023.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA

KETUA,

 JHONY BANUA ROUW, SE

Lampiran Keputusan DPR Papua

Nomor : 1 / DPRD/2023

Tanggal : 8 Maret 2023

Tentang : PROSNAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA) TAHUN 2023

**DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PROPEMPERDA)
PROVINSI PAPUA TAHUN 2023**

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI	TARGET	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
A. USULAN GUBERNUR											
1	RAPERDASI	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none">- PAJAK DAERAH- Jenis Pajak- Pajak Kendaraan Bermotor- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor- Pajak Alat Berat- Pajak Air Permukaan- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor- Pajak Rokok- Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan- RETRIBUSI DAERAH- Jenis dan Objek Retribusi- Retribusi Jasa Umum- Retribusi Jasa Usaha- Retribusi Perizinan Tertentu	Baru		Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang <i>Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</i>	Ya		Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua	2023	Raperdasi ini didelegasikan UU No. 1/2022 dengan batas waktu diundangkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tgl UU No.1/2022 mulai berlaku (5 Januari 2022)
2	RAPERDASI	Keolahragaan	<ul style="list-style-type: none">- Ruang Lingkup dan Prinsip-Prinsip Pengelolaan, Pembinaan dan Pengembangan- Kejuaraan, Pekan, Festival Olahraga- Sarana, Prasarana, Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi- Koordinasi dan Pengawasan, serta Peran Serta Masyarakat	Baru		<ul style="list-style-type: none">- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang <i>Sistem Keolahragaan Nasional</i>- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang <i>Penyelenggaraan Olahraga</i>	Ya		Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua	2023	Raperdasi ini tdk didelegasikan tetapi dibutuhkan dalam kebijakan daerah terkait keolahra-gaan di Papua
3	RAPERDASI	Manajemen Aparatur Sipil Negara	<ul style="list-style-type: none">- Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan ASN- Pengadaan ASN- Pangkat dan Jabatan	Baru		Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang <i>Kewenangan dan Kelemba-</i>	Ya		Badan Kepegawaian Daerah Prov. Papua	2023	Raperdasi ini didelegasikan oleh PP106/2021 tanpa batas

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI	TARGET	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
1	PERANGKAT DAERAH	Pemerintahan Distrik	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Karier PNS - Pengembangan Kompetensi ASN - Penilaian Kinerja dan Disiplin - Penghargaan - Pemberhentian PNS/Pemutusan Hubungan Kerja PPPK - Pengesahan dan Tunjangan - Perlindungan 			<p>gagan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua</p>					waktu diundang-kan Sejalan dengan Pasal 27 UU No. 21 Tahun 2001
2	PERANGKAT DAERAH	Pemerintahan Distrik	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Pemerintahan Distrik - Penyelenggaraan Pemerintahan Distrik - Kedudukan dan Tugas Pemerintah Distrik - Pelaksanaan Tugas Pemerintahan Distrik - Struktur Organisasi, Nomenklatur, dan Eselonisasi Pemerintahan Distrik - Pembinaan dan Pemantauan - Dukungan Sumber Daya Manusia - Pembiayaan 	Baru		<p>Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua</p>	Ya		Biro Tata Pemerintahan dan Otsus Setda Prov. Papua	2023	Raperdas ini didelegasikan PP No. 106/2021 tanpa batas waktu diundang-kan
3	PERANGKAT DAERAH	Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Perangkat Daerah - Jenis dan Susunan Perangkat Daerah - Kedudukan Tugas dan Fungsi - Jabatan Perangkat Daerah - Perangkat Daerah Baru 	Baru		<p>Pasal 25 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 Tentang Kewenangan dan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus</p>	Ya		Biro Organisasi Setda Prov. Papua	2023	Raperdas ini didelegasikan PP No. 106/2021 tanpa batas waktu diundang-kan
4	PERANGKAT DAERAH	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan dan Susunan Perangkat - Susunan Perangkat Daerah - Staf Ahli - Kepegawaian - Pembiayaan 	Baru		<p>Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah</p>	Ya		Biro Organisasi Setda Prov. Papua	2023	Raperdas ini terkait dengan pengaturan ulang perangkat daerah

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENIELASAN			
7	NASIBUDASI	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2043	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Lingkup Wilayah - Tujuan, Kebijakan, dan Strategi - Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi - Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi - Kawasan Strategis Provinsi - Arah dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi - Arah dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi - Peran Masyarakat dan Kelembagaan - Penyidikan 			Pasal 23 ayat (6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang	Ya		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2023	Raperdas ini didelegasikan UU No. 26/2007 dengan batas waktu diundang kan paling lama 3 (tiga) tahun sejak UU26/2007 mulai berlaku (26 April 2007)
8	RAPEXNIDASI	Pengelolaan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Ruang Lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah - Pengelola Keuangan Daerah - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Penyusunan Rancangan APBD - Penetapan APBD - Pelaksanaan dan Penatausahaan - Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD - Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 			Pasal 36 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Ya		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua	2023	Raperdas ini didelegasikan UU No. 2/2021 dengan batas waktu diundang kan paling lambat 1 (satu) tahun sejak UU No. 2/2021 berlaku (19 Juli 2021)

NO.	RIND	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
			Pemerintah Daerah - Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - Kekayaan Daerah dan Piutang Daerah - Badan Layanan Umum Daerah - Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah - Informasi Keuangan Daerah - Pembinaan dan Pengawasan								Pasal 3 Permen- dagri Nomor 77 Tahun 2020, Perda Pengelo- laan Keuangan Daerah ditetap- kan paling lama Tahun 2022
3	DAFTAR DAFTAR	Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Di Provinsi Papua	- Kewenangan Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota - Pendidikan - Kebudayaan - Kesehatan - Sosial - Ekonomi Kerakyatan - Energi dan Sumber Daya Mineral - Kelautan dan Perikanan - Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung/Kampung Adat - Perhubungan - Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Ketenagakerjaan - Kehutanan - Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman - Pertanahan - Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat - Integrasi Rencana Pembangunan Berbasis Kewenangan Khusus Perlindungan dan Pemberdayaan Orang Asli Papua	Baru		Pasal 4 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 21 Tahun 2001 Pasal 4 ayat (7) UU No. 2 Tahun 2021 Kewenangan Khusus Provinsi dan Kewenangan Khusus Kabupaten/Kota diatur dengan PP	Ya		Biro Tata Pemerintahan dan Otsus Setda Prov. Papua	2023	Ketentuan Pasal 4 UU No. 21 Tahun 2001 diubah sebagai-mana diatur dlm ketentuan Pasal 4 ayat (7) bahwa "Ketentuan mengenai pelak-sanaan kewe-nangan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI	INSTANSI	TARGET	KETERANGAN
				BARU	UBAH					
8. INISIASI DPRP										
1	RAPERDASI	Perubahan Perdesi No. 9 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan DPRP Yang Diusulkan Melalui Mekanisme Pengajuan Periode 2019-2024 jo Perubahan Peraturan DPRP No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib DPRP	<ul style="list-style-type: none">- Mengubah Pasal 36 ayat (1) Perdesi No. 9 Tahun 2019- Mengubah rumusan Pasal 25 Peraturan DPRP tentang Tata tertib tugas dan wewenang DPRP menyesuaikan dengan rumusan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021- Mengubah rumusan Pasal 48 Peraturan DPRP menyesuaikan dengan rumusan Pasal 32 ayat (1) yang memertegasikan anggota DPRP yang diangkat dari unsur Orang Asli Papua- Ketentuan Pasal 50 ayat (3) diubah dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan ayat (4a) sesuai ketentuan Pasal 36 (3) PP 106/2021- Menyisipkan Pasal 61A di antara Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan DPRP tentang Tata sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (3)	Ubah	Pasal 32 ayat (6) dan Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021	Ya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua	2023	Inisiatif: Bapempera Raperdasi dan Peraturan DPRP menyesuaikan dengan UU No. 2 Tahun 2021 dan PP 106/2021	
2	RAPERDASI	Rencana Pembangunan Industri Provinsi Papua Tahun 2022-2042	<ul style="list-style-type: none">- Kewenangan Pemerintah Daerah- Industri Unggulan Provinsi- Kawasan Peruntukan Industri dan Kawasan- RPP Papua 2022-2024- Kaidah Pelaksanaan- Sumber Daya Manusia Industri- Pembinaan dan Pengawasan- Pembiayaan	Baru	Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian	Ya	Dinas Perindustrian PerdaganganKoperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Provinsi Papua	2023	Inisiatif: Komisi II DPRP Raperdasi ini didelegasikan dengan batas waktu ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak UU Nomor 3/2014 berlaku (15 Januari 2014)	

NO	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI NA PENIELASAN	INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH					
3	RAKORPOMSI	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta Didik - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Formal - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal - Pendidikan Informal - Wajib Belajar - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus - Pendidikan Berbasis Muatan Lokal - Pendidik dan Tenaga Pendidik - Sarana dan Prasarana Pendidikan - Evaluasi - Pengawasan - Pendanaan 	Baru		Tidak diamatkan secara langsung dalam UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 2 Tahun 2021	Ya	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua	2023	<p>Inisiatif: Anggota DPRP</p> <p>Pengaturan terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan diatur dalam PP 106/2021 sebagaimana amanat Pasal 56 ayat (9) UU No.2 Tahun 2021</p>
4	RAKORPOMSI	Kepolisian Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pengangkatan Kapolda - Rekrutmen Bintara Polisi - Seleksi Perwira Pertama Polisi - Seleksi Perwira Menengah dan Tinggi - Penempatan pada Jabatan di Polda Papua, Polres dan Polsek - Peradilan Adat - Penjaga Wilayah Adat - Pelaksanaan Kamtibmas 	Baru		Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Ya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua	2023	<p>Inisiatif: Anggota DPRP</p> <p>Didelegasikan oleh UU 21/2001 aspek yang diatur terkait hal tertentu mengenai tugas kepolisian di provinsi Papua</p>
5	RAKORPOMSI	Penguatan Lembaga Pelopor Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan Lembaga Pelopor Pendidikan - Pengaturan Penguatan - Tata Cara dan Penetapan Pemberian Penguatan - Mutasi Kepegawaian - Gaji - Kewajiban - Pengawasan - Pembiayaan 	Baru		Tidak diamatkan secara langsung dalam UU No. 21 Tahun 2001 jo UU Nomor 2 Tahun 2021	Ya	Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Prov. Papua	2023	<p>Inisiatif: Anggota DPRP</p> <p>Fokus pada 5 yayasan pelopor pendidikan di tanah Papua</p>
6	RAKORPOMSI	Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggaraan Bencana Daerah Provinsi Papua	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan, kedudukan, Tugas dan Fungsi - Organisasi 	Baru		UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana	Ya	Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan	2023	<p>Inisiatif: Komisi I DPRP</p>

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
			<ul style="list-style-type: none"> - Tata Kerja - Pengangkatan, Pemberhentian dan Eselonisasi 			PP 21/2008 <i>Penyelenggara Penanggulangan Bencana</i>			Bencana Daerah Provinsi Papua		Tidak didelegasikan
7	RAPERDASI	Papua Sebagai Provinsi Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Venue dan Aset Olahraga - Atlet Olahraga - Kepelatihan Olahraga - Pembinaan Olahraga - Prestasi Olahraga - Grand Desain Olahraga Daerah 	Baru		Kebutuhan Hukum dan Aspirasi Masyarakat		Ya	Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua	2023	Inisiatif: Komisi V DPRP Raperdasi ini tdk didelegasikan tetapi sangat dibutuhkan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pemanfaatan venue olahraga pasca PON XX untuk meningkatkan prestasi olahraga provinsi Papua secara terpadu dan terukur dalam desain besar olahraga daerah provinsi Papua
8	RAPERDASI	Pengadaan Barang dan Jasa Pelaku Usaha Asli Papua	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa - Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa - Pengusaha Asli Papua - Pengadaan Barang dan Jasa - Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik - Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua - Pembinaan dan Pengembangan - Pengawasan 	Baru		Aspirasi Masyarakat Daerah	Ya		Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Papua	2023	Inisiatif: Anggota DPRP Raperdasi ini tidak didelegasikan

NO.	JENIS	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	DISERTAI		INSTANSI TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
				BARU	UBAH		NA	PENJELASAN			
9	RAPERDASUS	Pengawasan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Hak dan Kewajiban Masyarakat - Bentuk Pengawasan Sosial - Dengar Pendapat Umum - Hubungan Dengan Lembaga Lain - Penghargaan - Sanksi 	Baru		Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua	Ya		Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus Setda Provinsi Papua	2023	<p>Inisiatif: Anggota DPRP</p> <p>Raperdasi ini didelegasikan oleh UU 21/2001 Tanpa Batas Waktu diundangkan</p>
10	RAPERDASUS	Pembudayaan dan Perlindungan Ekonomi Orang Asli Papua	<ul style="list-style-type: none"> - Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah - Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha - Kemitraan - Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian - Pembiayaan 	Baru		Pasal 38 ayat (2) Undang-Nomor 2 Tahun 2021 Tentang <i>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua</i>	Ya		Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	2023	<p>Inisiatif: Anggota DPRP</p> <p>Raperdasi ini didelegasikan oleh UU 21/2001 dengan batas waktu</p>

